

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



AZMANIRAH MARDHATILLAH

E 121 08 852

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

AZMANIRAH MARDHATILLAH

E12108852

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

pada tanggal 29 Januari 2013

dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hasrat Arief Saleh, MS
19511011 198003 1 002

NIP. H. Suhardiman Samsu, S.Sos, M.Si
NIP. 19680411 200012 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. A. Gau Kadir, MA

NIP. 195001171980031 002

Dr. H. A. Gau Kadir, MA

NIP. 195001171980031 002

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

AZMANIRAH MARDHATILLAH

E12108852

telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2013.

Menyetujui :

Panitia Ujian :

Ketua : Dr. Hasrat Arief Saleh, MS (.....)

Sekretaris : Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Dr. H. A. Gau Kadir, MA (.....)

Anggota : H.Suhardiman Samsu, S.Sos, M.Si (.....)

Anggota : Andi Murfhi, S.Sos., M.Si (.....)

Pembimbing I : Dr. Hasrat Arief Saleh, MS (.....)

Pembimbing II : H.Suhardiman Samsu, S.Sos, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dapat dipungkiri dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan atau kesalahan yang telah diperbuat, maka dari itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari proposal, penelitian hingga pengolahan data, melibatkan banyak pihak yang sangat member andil besar pada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Mami Hj.Rukasdamingtjih dan Ayah H.M.Isbar,M.Si atas kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang tiada henti kalian panjatkan untuk ananda. Maafkan jika ananda selalu membuat kalian kecewa dan sedih.
2. Saudara/i ku tercinta, Muh.Rezha Septiandi,SE, Rezki Amanda, Padlana Mardhatillah, Annisa Fadillah Mardhatillah, Erwin Rinaldi, SE dan Rosmala Mubarik, SE. Terima kasih atas kasih sayang kalian.
3. Bapak Dr.Hasrat Arief Saleh, MS selaku pembimbing I dan Bapak H.Suhardiman Samsu selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulisan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan FISIP UNHAS khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Gau Kadir, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS.
6. Ibu Suherni Madjid dan Ayah Ishak Madjid, serta saudara-saudaraku di Jl. Masjid Babul Jannah 28.
7. Sahabat- sahabatku: Munarti Ramli,SE, Tuti Budiarti,SE, Nursyamsi Ardiyanti,SS, Restu Islamyah,SS, Meilani Anryani,SS, Elvira,SS, Mulya Normalitasari, A.Fitriani Syukur,ST, Nooryasni Muchlis,S.ked, Rini Indriani,S.Ip, Arianitalia,S.Ip, A.Annisa Fadillah,SE, A.Tenri Tekke, Abd.Rachman Al-Jufry Salampessy,SE, M.Chaidir Fitriawan,S.P, Faisal Jannuar.
8. Keluarga besar UKM Bola Basket Unhas. *We Can!* Semoga terus berprestasi.
9. Teman- teman seperjuangan naik turun gunung KKN Reguler 80 Sinjai Barat.
10. Saudara-saudariku Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS Glasnost 08, Asrul, Ashar, Avrina, Agusman, Aan, Fahri, Fitriani, Melisa, Isgunandar, Haswan, Anjar, Anita, Ahwandy, M.Nur Hidayat, Miskat, Kukuh, A.Ardiana, Indah, Firman, Akmaluddin, Abdul Gafur, Dedi, Subandi, Hijra, Lutfi, Fonna, Edi, Hidayatul, Ayu, Nurlaila, Erlangga, Andi Ashabul, Reksa, Reskianto, Ansari, Aswardi, Herwin, Yuniar, Akram, Kasmira, Ermitha, Farid, Zainal, Zahra, A.Muzkirah, Alfriyady,

Istiana, Sufriyadi, Desi, Amin, Asrul Prayudha, Silvanti, Satriah, Agus, Reza, Syukriyadi.

11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. The unintelligible, AFM.

13. Terakhir, skripsi ini kupersembahkan untuk saudara tersayang sekaligus sahabat terbaik seumur hidup, alm. H. Ritzy Nugraha. Semoga kamu tenang disisi-Nya.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan. Semoga semuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Sekian dan terimakasih

Makassar, Januari 2013

Penulis

ABSTRAK

AZMANIRAH MARDHATILLAH, Nomor Pokok E 121 08 852, Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: **“ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA”** di bawah bimbingan Dr.Hasrat Arief Saleh,MS dan H.Suhardiman Samsu,S.Sos,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner,wawancara,studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan olah data SPSS.

Hasil penelitian dianalisis dalam tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, c. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana.

ABSTRACT

AZMANIRAH MARDHATILLAH, register number E 121 08 852, write a minithesis titled: **“ANALYSIS SUBDISTRICT’S MAIN DUTY AND FUNCTION ON GOVERNMENT IMPLEMENTATION AT SOMBA OPU SUBDISTRICT GOWA REGENCY”** under the guidance from Dr. Hasrat Arief Saleh, MS and H Suhardiman Samsu, S.Sos., M.Si.

This research is carried out to know the realization of the main duty and function of a subdistrict especially on the public improvement activity coordination at SombaOpu subdistrict Gowa regency. The data retrieval method that used in this research is by giving questioner, interviewing, literature studying, and observation. The data retrieved will be analyzed qualitatively and quantitatively with SPSS data processing.

The analysis of the result that have been retrieved consists of: a. Encourage people to participate in the development plan on the scope of subdistrict in the development pain conference forum at districts. b. Do the development and supervision to the entire unit, form the government to private that has the acitivity and programs of the public development in the area of the subdistrict. c. Evaluate public development activity in the subdistrict from government to private. Some factor that effect the implementation of the main duty and the function of subdistrict in coordinating the public development activity, are: the capability of subdistrict’s leadership, fund conditions, the medium and infrastructure.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecamatan dan Camat.....	6
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Camat.....	13

2.3 Masyarakat.....	21
2.4 Konsep Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	24
2.4.2 Proses Pemberdayaan.....	25
2.4.3 Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.5 Kerangka Konseptual.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	34
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian.....	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Definisi Operasional.....	35
3.6 Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Daerah Penelitian.....	39
4.2 Karakteristik Responden.....	47
4.3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Somba Opu.....	51
4.4 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan	

Fungsi Camat.....	57
-------------------	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	67
---------------------	----

5.2 Saran.....	69
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Kewenangan Camat.....	11
Tabel 4.1	Pembagian Luas Wilayah Kecamatan.....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.3	Umur, Status perkawinan dan Jenis Kelamin Responden.....	47
Tabel 4.4	Tempat Lahir Responden.....	48
Tabel 4.5	Suku Bangsa.....	48
Tabel 4.6	Agama.....	49
Tabel 4.7	Pendidikan.....	49
Tabel 4.8	Pekerjaan.....	50
Tabel 4.9	Gambaran Umum Variabel Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Somba Opu.....	51
Tabel 4.10	Skor Rata- rata Partisipasi.....	53
Tabel 4.11	Skor Rata- rata Pembinaan dan Pengawasan.....	55
Tabel 4.12	Skor Rata- rata Evaluasi.....	56
Tabel 4.13	Total Variabel 1.....	56
Tabel 4.14	Gambaran Umum Variabel Faktor- faktor yang	

Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi Camat..... 57

Tabel 4.15 Faktor Kepemimpinan Camat..... 58

Tabel 4.16 Faktor Sarana dan Prasarana..... 60

Tabel 4.17 Faktor Dukungan Anggaran..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang, yakni pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 kedudukan kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi berubah menjadi perangkat kabupaten/ kota yang nasibnya sangat tergantung pada “kebaikan hati” Bupati/ Walikota dalam mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Seiring dengan perguliran waktu, nasib organisasi kecamatan juga tidak begitu jelas, dalam arti apakah akan menjadi semakin berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataukah justru mengalami penghapusan.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan".

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada pasal 126 ayat 3 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Somba Opu sebagai ibukota Kabupaten Gowa menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu sub-sistem pemerintahan di Indonesia, Kecamatan Somba Opu yang memiliki visi "Menjadikan Kecamatan Somba Opu sebagai percontohan dalam pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kabupaten Gowa" mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Sebagai kecamatan yang juga berbatasan langsung dengan ibukota provinsi, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan lebih banyak ditemukan di kecamatan Somba Opu ini. Untuk itu, camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengingat luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penulis membatasi pembahasan pada tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

.1.2.1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

1.2.2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

1.3.2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah setempat agar dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4.2. Sebagai bahan informasi yang dapat memberikan gambaran umum mengenai tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kecamatan dan Camat

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub-sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Nordholt (1987:23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a. Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;
- c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif.

Pada masa Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom

yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Apabila dipandang perlu, antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang- Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Sesuai amanat Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional.

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, bulir 1 huruf h disebutkan bahwa, kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan,

peradilan, monev dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/ kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith (1985) dinamakan sebagai “Fused Model”. Daerah kabupaten/ kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan “Split Model” (Smith:1985). Karena asas dekonsentrasi urusan

pemerintahan khusus, diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai di tingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Berbeda dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dari kedua definisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridiksi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, "Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah,

secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan instansi dengan lembaga dinas daerah ataupun lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik.

Sebagai perangkat daerah, camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Ini berarti bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Camat merupakan kewenangan yang dilimpahkan

oleh Bupati/ Walikota. Dengan demikian luas atau terbatasnya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota sangat tergantung pada keinginan politis dari Bupati/Walikota.

Tabel 2.1. Perbandingan Kewenangan Camat sebagai Kepala Wilayah dan Camat sebagai Perangkat Daerah

Camat sebagai kepala wilayah	Camat sebagai perangkat daerah
<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan merupakan “wilayah administrasi pemerintahan”. - Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ Walikota dalam bidang desentralisasi. - Kewenangan yang dijalankan camat hanya bersifat delegasi dari Bupati/ Walikota. - Kecamatan dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan merupakan “wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota”. - Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif) - Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. (kewenangan atributif). - Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Tugas umum pemerintahan yang dimaksud dalam pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan umum adalah: “urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah”. Urusan pemerintahan umum ini diselenggarakan oleh setiap kepala wilayah pada setiap tingkatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah. Selain itu, intinya juga berbeda. Tugas umum pemerintahan sebagai kewenangan atributif mencakup tiga jenis kewenangan yakni kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan serta kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan koordinasi dan pembinaan merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung (*indirect services*), karena yang dilayani adalah entitas pemerintahan lainnya sebagai pengguna (*users*), meskipun pengguna akhirnya (*end users*) tetap masyarakat. Sedangkan kewenangan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pengguna (*users*) maupun pengguna akhirnya (*end users*) sama yakni masyarakat. Jenis pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan secara langsung (*direct services*).

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama kewenangan delegatif kepada Camat menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya merupakan koreksi terhadap Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999. Pada masa Undang-Undang tersebut, Camat hanya memiliki kewenangan delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai kewenangan atributif. Dalam prakteknya selama Undang-Undang tersebut berlaku, masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat, entah karena tidak tahu ataupun karena tidak mau tahu. Akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang menjadi kewenangannya. Mereka umumnya hanya menjalankan kewenangan tradisional yang sudah dijalankan secara turun-temurun, padahal peraturan perundang-undangnya sudah berubah. Posisi camat menjadi serba tidak menentu.

Sebagai intitusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak member manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

2.2. Tugas Pokok dan fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang- undang 32 tahun 2004 pasal 126 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Selain tugas tersebut diatas,dalam PP nomor 19 tahun 2008 dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a) Perizinan
- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitasi
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan, dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/ walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- d) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan; dan,
- e) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tugas ini meliputi:

- a) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

- b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.
 - b) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - b) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
 - a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
 - d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan

- e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, meliputi:
 - a) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - b) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - d) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
 - e) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

PP Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.

Selain itu, dipaparkan pula tugas pokok dan fungsi camat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Gowa.

Adapun tugas pokok Camat memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan perekonomian masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Camat berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas Camat sebagai berikut :

- a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- f. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya.

- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) serta keuangan Kecamatan.
- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait.
- j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- 2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraa ketentraman dan ketertiban umum;
- 4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Masyarakat

Dalam kamus politik disebutkan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas- luasnya dan terkait oleh suatu kehidupan yang mereka anggap sama. Selanjutnya menurut Shadily (1993:47) mengemukakan bahwa:

“Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karenanya sendiri bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.”

Dalam konteks pemikiran sistematis, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial. Pandangan ini selain merujuk pada suatu masyarakat besar, misalnya masyarakat kecamatan, juga dapat merujuk pada masyarakat yang kecil misalnya keluarga, sekolah, organisasi dan lain-lain. Menurut Parson, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang kemudian dapat diartikan bahwa kehidupan itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dan bagian atau unsure yang saling berhubungan antara satu sama lain terdapat saling ketergantungan dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Kehidupan sosial yang seperti inilah yang disebut sistem sosial.

Sebuah sistem sosial dapat juga disebut sebagai sebuah pola interaksi sosial dari komponen-komponen sosial yang teratur dan terlembagakan. Komponen-komponen sosial itu adalah beberapa peran-peran sosial misalnya peran dalam bidang pemerintahan (Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Dosen, Guru dan lain-lain).

Komponen-komponen inilah yang kemudian saling berhubungan dimana terdapat saling ketergantungan antara satu dengan yang lain.

Karakteristik lain dari sistem sosial adalah kecenderungan dalam mempertahankan ekulibrium atau keseimbangannya. Dengan kata lain diperlukan adanya keteraturan dalam sebuah sistem, jika dalam sebuah sistem terjadi penyimpangan atau ketidakteraturan dari norma, maka sistem tersebut akan berusaha menyesuaikan diri dan mencoba kembali pada keadaan semula. Hal ini dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika ada sebuah budaya dari luar yang mulai masuk, maka masyarakat akan berusaha resisten terhadap budaya tersebut karena dinilai akan mengancam keseimbangan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem, menurut Parsons ada 4 sub-sistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu:

1. Fungsi adaptasi
2. Fungsi pencapaian tujuan
3. Fungsi integrasi
4. Fungsi untuk mempertahankan atau menegakkan pola dan struktur masyarakat.

Fungsi adaptasi akan diperankan oleh sub-sistem ekonomi yang melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya pelaksanaan produksi dan distribusi barang dan jasa serta akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

Fungsi pencapaian tujuan akan diperankan oleh sub-sistem politik yang melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan monopoli unsure penggunaan paksaan

yang terlegitimasi. Sub-sistem ini juga akan bekerja memaksimalkan potensi masyarakat dalam mencapai tujuan kolektifnya.

Fungsi integrasi diperankan oleh sub-sistem hukum yang melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk membentuk solidaritas sosial.

Fungsi mempertahankan dan menegakkan pola dan struktur masyarakat diperankan oleh sub-sistem budaya yang menangani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses perubahan masyarakat yang menyebabkan perubahan tersebut. Kehidupan yang teratur dan aman dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan pengorbanan sebagian kemerdekaan anggota-anggotanya, baik dengan paksaan atau dengan sukarela. Pengorbanan dalam hal ini adalah dengan menahan nafsu dan perbuatan sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingan dan keamanan bersama. Paksaan dalam hal ini adalah dengan tunduk kepada hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat (Negara, Perkumpulan dan lain-lain), sedangkan sukarela berarti menurut adat dan berdasarkan keinsyafan akan persaudaraan dalam kehidupan bersama tersebut.

Setiap tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan hubungan baru yang sifatnya kekal ataupun sementara. Hubungan itu adalah mengikat ataupun menceraikan. Masyarakat tersusun dari golongan-golongan atau berbagai organisasi yang oleh manusia yang hidup dalam alam modern harus dialami misalnya

kehendak untuk berorganisasi harus didahului dengan menjadi anggota dari sebuah organisasi. Selanjutnya jika seseorang keluar dari golongan atau perkumpulan tertentu, maka dilain waktu ia harus memasuki lingkungan atau golongan lain.

Proses masyarakat tersebut terjadi oleh naluri manusia dimana. Manusia adalah mahluk sosial dimana jika dua orang atau lebih saling berinteraksi berdasarkan suatu motif atau tujuan dan proses interaksi tersebut terjadi berulang kali menurut pola-pola tertentu maka dengan sendirinya terbentuklah masyarakat.

2.4. Konsep Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Robinson (1994) menjelaskan bahwa:

“Pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.”

Ife (1995) mengemukakan bahwa:

“Pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.”

Payne (1997) menjelaskan bahwa:

“Pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.”

2.4.2. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa:

“Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

- Mampu memahami diri dan potensinya,
- Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
- Mampu mengarahkan dirinya sendiri
- Memiliki kekuatan untuk berunding
- Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
- Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa:

“Yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani

mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.”

Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

2.4.3. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa:

“Konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.”

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa:

“Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material.”

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan

keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.5 Kerangka Konseptual

Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat 2). Camat adalah kepala kecamatan. Jabatan camat adalah jabatan karier yang dijabat oleh PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat daerah kecamatan. Secara struktural camat berada langsung dibawah bupati, akan tetapi pertanggung jawabannya dilakukan secara administratif melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

Dalam kerangka otonomi daerah, tugas dan fungsi camat ditempatkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan lebih yang kemudian dipercayakan untuk mengatur masyarakatnya.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat kemudian tertuang dalam Undang- undang 32 tahun 2004 pasal 126 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat antara lain:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Selain tugas tersebut diatas,dalam PP nomor 19 tahun 2008 dijelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan, dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur dengan peraturan bupati/ walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- d) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -undangan; dan,
- e) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

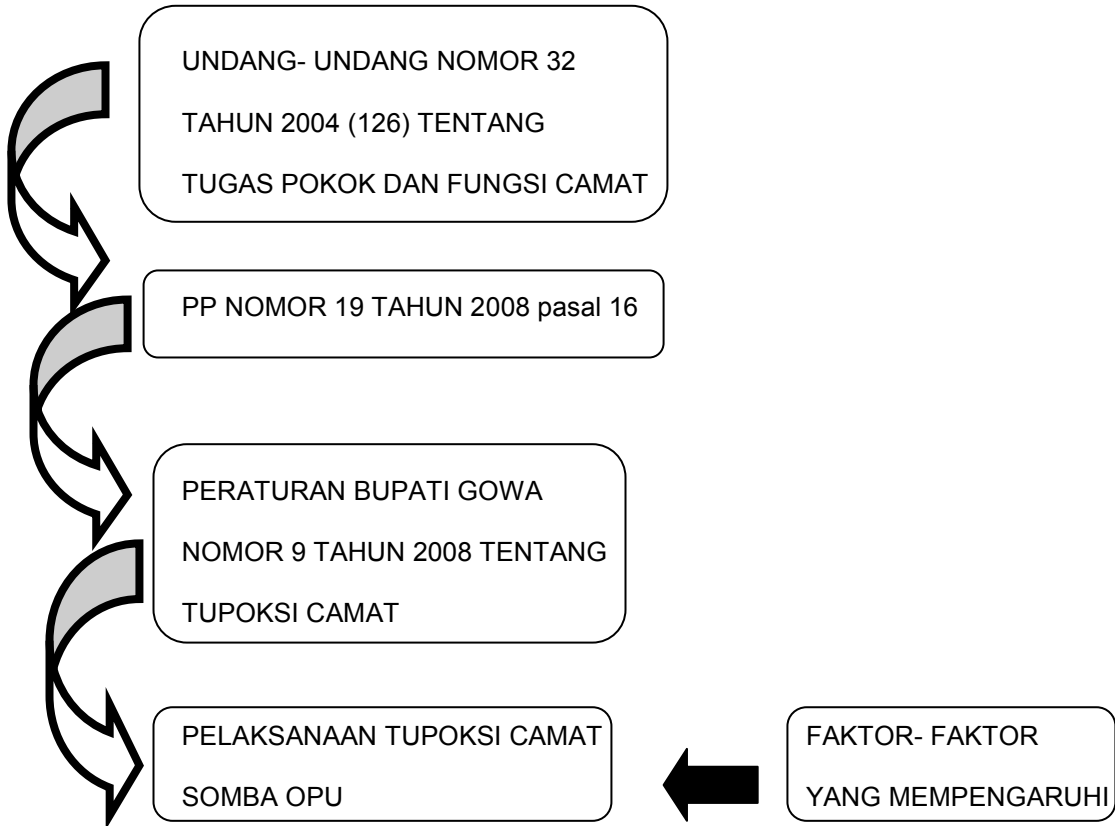
Tugas ini meliputi:

- a) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan.
 - b) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- b) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
- a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
 - c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
- a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan

- c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah
 - d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
 - e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, meliputi:
- a) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - b) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - d) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
 - e) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggambarkan skema kerangka konseptual sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan jumlah penduduk 130.126 jiwa dengan jumlah 14 kelurahan.

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena obyek yang diteliti.

Dasar penelitian adalah survey yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representative.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan responden yang ada di wilayah Kecamatan Somba Opu. Fokus penelitian dalam hal ini terdiri dari unsur Kantor Kecamatan Somba Opu dan masyarakat Kecamatan Somba Opu.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling* yaitu memilih secara sengaja responden yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kewenangan Camat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Somba Opu terdiri dari 14 kelurahan, maka responden yang diambil adalah:

1. Kelurahan Sungguminasa	10 orang
2. Kelurahan Bonto-bontoa	10 orang
3. Kelurahan Batangkaluku	10 orang
4. Kelurahan Tompobalang	10 orang
5. Kelurahan Katangka	10 orang
6. Kelurahan Pandang-pandang	10 orang
7. Kelurahan Tombolo	10 orang
8. Kelurahan Kalegowa	10 orang
9. Kelurahan Samata	10 orang
10. Kelurahan Romang Polong	10 orang
11. Kelurahan Paccinongang	10 orang
12. Kelurahan Tamarunang	10 orang
13. Kelurahan Bontoramba	10 orang
14. <u>Kelurahan Mawang</u>	<u>10 orang</u>
Jumlah	140 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.

3.5 Defenisi Operasional

1. Tugas pokok dan fungsi camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 kemudian diperjelas lagi

pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2008, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Dari ketiga tugas pokok dan fungsi camat ini, kemudian ditetapkan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan camat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, antara lain: tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dimana dalam penelitian ini dibatasi pada mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- a. Kepemimpinan camat

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai

hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki pada tingkat kecamatan tentu sangat mempengaruhi bagaimana pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan dari program tersebut.

c. Dukungan anggaran

Dukungan anggaran adalah hal yang esensial dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat karena seperti yang diketahui bahwa setiap pelaksanaan program tentu memerlukan dana dalam menunjang terlaksananya kegiatan.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu analisis yang dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan perhitungan matematik. Analisis kualitatif dalam hal ini adalah teknik analisis dengan menggunakan cara berfikir atau logika induktif atas data- data yang diperoleh.

Data- data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dengan responden diubah menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada masing- masing pilihan jawaban dengan menggunakan skala likert. Beberapa variabel yang relevan dengan masalah/ tujuan penelitian diberi skor dengan bobot nilai 1 sampai 4. Jumlah skor tiap variabel

dibagi dengan jumlah responden sehingga didapatkan rata- rata skor. Rumus mengukur angka kategori dan skor responden adalah:

$$\text{Nilai rata – rata (Rerata)} = \frac{\sum n.f}{\sum f}$$

Rata- rata (rerata) skor tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori yakni:

1. Rata- rata > 3 = dikategorikan tinggi.
2. Rata- rata 2-3 = dikategorikan sedang.
3. Rata- rata < 2 = dikategorikan rendah.

Apabila dalam suatu indikator terdapat lebih dari satu pertanyaan maka total skor dari setiap pertanyaan akan dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah pertanyaan kemudian dibagi dengan banyaknya jumlah pertanyaan dan akan menghasilkan rata- rata.

Untuk mendukung data tafsiran kuantitatif, maka akan diperjelas lagi dengan analisa dari hasil wawancara. Metode ini digunakan untuk menguatkan penjabaran data sehingga akan terlihat secara jelas hubungan skor penilaian dengan penjelasan langsung dari orang- orang yang mengetahui secara faktual apa yang terjadi dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini adalah temuan penelitian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi camat khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, karakteristik responden serta faktor-faktor yang mempengaruhi camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Somba Opu adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa, yang saat ini dipimpin oleh seorang Camat yang bernama Andi Kumala Idjo, SH yang merupakan Camat yang kesebelas. Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan Ibukota yang memiliki 14 Kelurahan dan 28 Lingkungan.

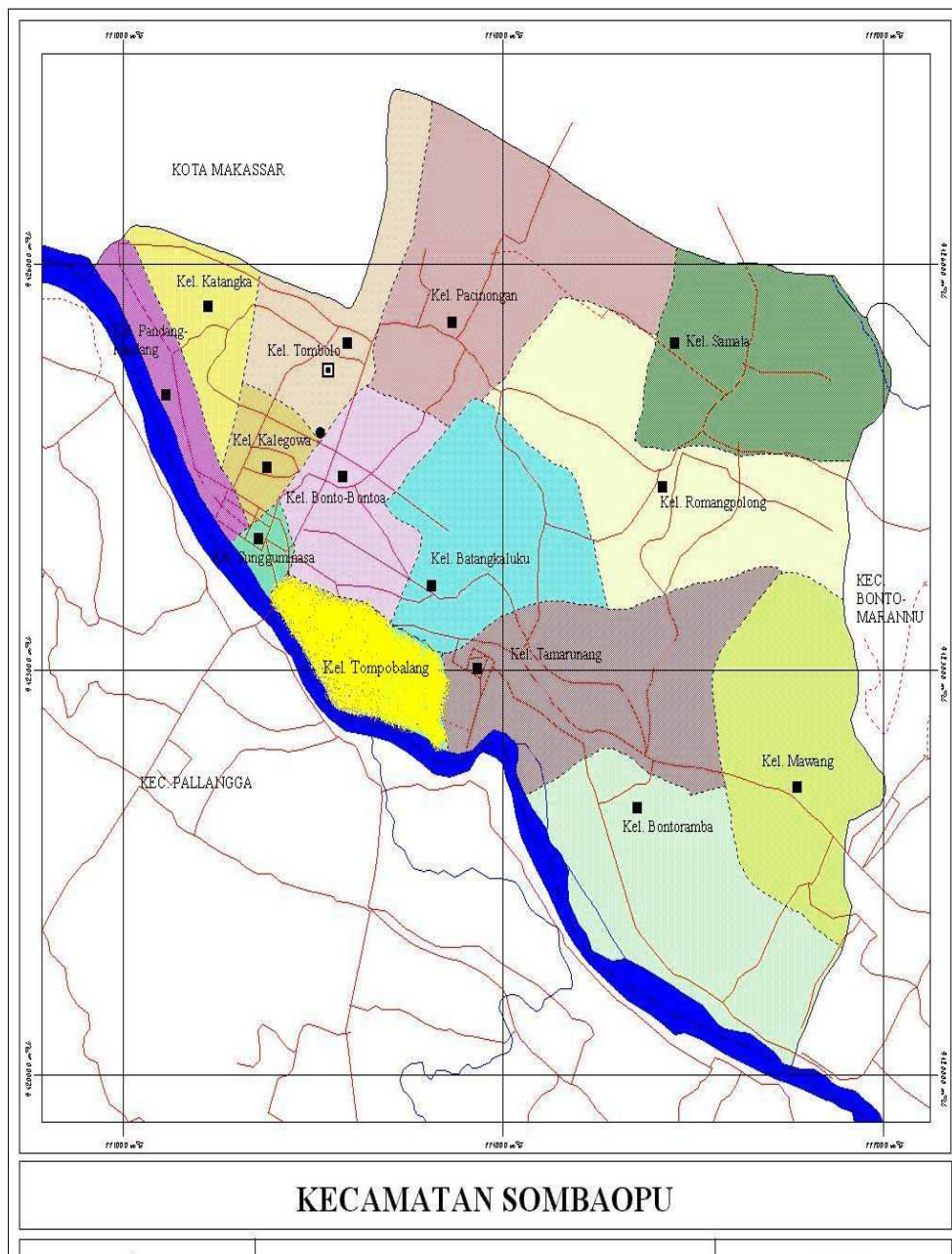
4.1 PROFIL DAERAH PENELITIAN

4.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Somba Opu merupakan satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa yang letaknya berada di Ibukota Kabupaten dan berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun luas kecamatan Somba Opu adalah 28,09 Km² atau 2.809 Ha. Adapun batas-batas wilayah kecamatan Somba Opu, sebagai berikut:

- d. Sebelah Utara : Kota Makassar
- e. Sebelah Barat : Kota Makassar
- f. Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga (Sungai Jeneberang)
- g. Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu.

PETA KECAMATAN SOMBA OPU



Tabel 4.1. Pembagian luas wilayah kelurahan Kecamatan Somba Opu

NO.	KELURAHAN	LUAS (KM²)
1	SUNGGUMINASA	1,46
2	BONTO-BONTOA	1,61
3	BATANGKALUKU	1,30
4	TOMPOBALANG	1,80
5	KATANGKA	1,36
6	PANDANG-PANDANG	1,55
7	TOMBOLO	2,06
8	KALEGOWA	1,21
9	SAMATA	2,44
10	ROMANG POLONG	3,71
11	PACCINONGANG	2,32
12	TAMARUNANG	2,16
13	BONTORAMBA	2,20
14	MAWANG	2,99
JUMLAH		28,09

Sumber: Data Kecamatan Somba Opu 2012

4.1.2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah 130.126 jiwa, terdiri dari laki-laki 64.442 jiwa dan perempuan 65.684 jiwa. Penyebaran penduduk kabupaten Gowa masih bertumpu di

kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa.

Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.632 orang/Km². Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Somba Opu adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di kabupaten Gowa yakni sebesar 4,07 persen. Kecamatan Somba Opu memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK.

Tingkat perkembangan kelurahan di kecamatan Somba Opu meliputi 3 kelurahan swakarya (self work) dan 11 kelurahan swasembada (self supporting). Tingkat perkembangan LKMD dari 14 kelurahan ada 1 LKMD Tingkat II, dan 13 LKMD Tingkat III. Jumlah personel pertahanan sipil (Hansip) dengan kualifikasi Linmas sebanyak 306 orang.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO.	KELURAHAN	PENDUDUK (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SUNGGUMINASA	3,462	3,807	7,269
2	BONTO-BONTOA	5,903	6,122	12,025
3	BATANGKALUKU	5,252	4,962	10,214
4	TOMPOBALANG	3,418	3,987	7,405
5	KATANGKA	4,526	4,705	9,231
6	PANDANG-PANDANG	2,886	2,981	5,867
7	TOMBOLO	7,097	7,337	14,434
8	KALEGOWA	1,641	1,216	2,857
9	SAMATA	3,639	3,672	7,311

10	ROMANG POLONG	2,207	2,200	4,407
11	PACCINONGANG	7,442	7,902	15,344
12	TAMARUNANG	6,595	6,377	12,972
13	BONTORAMBA	1,760	1,801	3,561
14	MAWANG	2,206	2,313	4,519
JUMLAH		58,034	59,382	117,416

Sumber: Data Kecamatan Somba Opu 2012

4.1.3. Kondisi Sosial dan Budaya

Somba Opu selain sebagai kecamatan Ibukota juga dikenal sebagai daerah yang memiliki adat istiadat yang kental karena memiliki banyak situs dan tempat-tempat bersejarah. Di kecamatan Somba Opu terdapat Istana Balla' Lompoa peninggalan kerajaan Gowa. Di kota ini pula terletak makam Sultan Gowa yaitu Sultan Hasanuddin dan leluhur serta penerus-penerusnya. Selain itu terdapat pula makam Syekh Yusuf yang terkenal hingga Madagaskar, India dan Afrika Selatan, juga makam Arung Palakka dari kerajaan Bone.

Masjid pertama di Sulawesi Selatan yang dibangun pada sekitar tahun 1600 Masehi juga terdapat di kota ini, tidak jauh dari makam Syekh Yusuf dan makam raja-raja Gowa dan Arung Palakka. Di tengah kecamatan juga mengalir sungai Jeneberang yang hulunya mulai dari gunung Lompobattang di kota wisata Malino dan bermuara ke selatan Makassar melalui kota Makassar di bagian selatan di sisi benteng Somba Opu yang dahulu merupakan benteng pertahanan raja-raja Gowa.

Pada zaman pembangunan sekarang ini, pendidikan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan pola pikir serta pengetahuan masyarakat untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia sekolah yang terus meningkat dari tahun ke

tahun, maka penyediaan sarana fisik pendidikan juga harus ditingkatkan, seperti gedung sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kecamatan Somba Opu sebagai bagian dari Kabupaten Gowa juga menjalankan program Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang dicanangkan oleh Bupati terpilih Ichsan Yasin Limpo.

Adapun rincian sarana pendidikan di kecamatan Somba Opu (menurut Badan Pusat Statistik, Gowa 2009) adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah sekolah taman kanak-kanak sebanyak 41 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 163 orang dan dengan jumlah murid sebanyak 2.327 orang.
- b. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 44 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 14 sekolah, sekolah inpres sebanyak 29 sekolah, dan sekolah swasta sebanyak 1 sekolah. Adapun jumlah guru adalah sebanyak 1.152 orang.
- c. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu sebanyak 1 sekolah, jumlah guru sebanyak 18 orang dengan jumlah murid sebanyak 103 orang.
- d. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 2 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 12 orang dan jumlah siswa sebanyak 174 orang.
- e. Jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 17 sekolah dengan perincian berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 6 sekolah, dan swasta sebanyak 11 sekolah.
- f. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 96 orang dengan jumlah murid sebanyak 837 orang.

- g. Jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 10 sekolah dengan rincian berdasarkan status yaitu 2 buah sekolah negeri dan 8 buah sekolah swasta dengan jumlah guru sebanyak 250 orang.
- h. Jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 100 orang dan jumlah murid sebanyak 675 orang.
- i. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 8 sekolah dengan rincian berdasarkan status yaitu 2 buah sekolah negeri dan 6 buah sekolah swasta dengan jumlah guru sebanyak 280 orang dan jumlah murid sebanyak 1.930 orang.

Adapun di bidang keagamaan terdapat beberapa tempat ibadah dengan rincian berdasarkan jenisnya yaitu:

- 1. Masjid : 107 buah
- 2. Mushollah : 16 buah
- 3. Langgar : 16 buah
- 4. Gereja : 7 buah

Adapun jumlah rohaniawan Islam adalah:

- a. Ulama : 6 orang
- b. Khatib : 168 orang
- c. Mubaligh : 93 orang
- d. Penyuluh Agama Muda : 13 orang
- e. Penyuluh Agama Madya : 7 orang

Sumber: Data Kecamatan Somba Opu 2012

4.1.4 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Somba Opu terdiri dari beberapa jenis, mulai dari usaha pembuatan roti, pembuatan drainase, pembuatan jalan, program Keluarga harapan, persampahan/kebersihan lingkungan, bidang peternakan dan budidaya perikanan, perbengkelan, usaha menjahit, pembuatan batu bata, posyandu, pembuatan sarana umum dan pemberdayaan masyarakat kerja sama PNPM Mandiri Perkotaan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat akan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan di kecamatan Somba Opu yang berlangsung pada bulan Januari setiap tahunnya. Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Gowa Dapil Somba Opu, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

4.2. Karakteristik Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 140 orang dengan rincian 10 orang tiap kelurahan dari 14 kelurahan yang ada di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Responden ditentukan secara sengaja dan yang dipilih merupakan anggota dan pengurus unit kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di tiap kelurahan sebagai bagian dari kewenangan camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

4.2.1. Umur Responden, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin

Dari 140 orang responden dalam penelitian ini, responden dengan umur 17-27 tahun sebanyak 32,8% atau 46 orang, responden dengan umur 28-37 tahun sebanyak

25,7% atau 36 orang, responden dengan umur 38-47 tahun sebanyak 24,2% atau 34 orang, dan responden dengan umur ≥ 48 sebanyak 17,3% atau 24 orang. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden masih berusia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Umur, Status Perkawinan, dan Jenis Kelamin Responden

Uraian	Frekuensi	Persen
Umur Responden		
17-27	46	32,8
28-37	36	25,7
38-47	34	24,2
≥ 48	24	17,3
Jumlah	140	100
Status Perkawinan		
Belum Kawin	34	24,2
Kawin	96	68,6
Janda/Duda	10	7,2
Jumlah	140	140
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	86	61,4
Perempuan	54	38,6
Jumlah	140	140

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

4.2.2. Tempat Lahir Responden

Dari 140 responden dari hasil penelitian ini, sebagian besar responden lahir diluar kabupaten Gowa yaitu sebesar 57,85%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Tempat Lahir Responden

Tempat Lahir	Frekuensi	Persen
Gowa	59	42,15
Luar Gowa	81	57,85
Jumlah	140	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

4.2.3. Suku Bangsa

Dari 140 responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah suku Makassar yaitu sebanyak 82 orang.

Tabel 4.4. Suku Bangsa

Suku Bangsa	Frekuensi	Persen
Makassar	82	58,5
Bugis	38	27,2
Toraja	6	4,3
Mandar	7	5
Lainnya	7	5
Jumlah	140	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

4.2.4. Agama

Hasil penelitian dari 140 responden menurut agamanya ditunjukkan dalam tabel

4.6.

Tabel 4.6. Agama

Agama	Frekuensi	Persen
Islam	120	85,7
Katolik	9	6,4
Protestan	11	7,9
Jumlah	140	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

4.2.5. Pendidikan Responden

Tabel 4.7. Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persen
SD	1	0,7
SMP	6	4,3
SMA	64	45,7
Diploma	25	17,7
S 1	40	28,7
S 2	4	2,9
Jumlah	140	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

Dari 140 responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 64 orang. Tingkat pendidikan yang bervariasi

tentunya juga akan berpengaruh terhadap jawaban- jawaban yang akan diberikan responden dalam mengisi kuesioner.

4.2.6. Pekerjaan Responden

Dari 140 responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pekerjaan utama responden yang paling dominan adalah pedagang dengan jumlah 55 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persen
Tidak ada	21	15
Petani	11	7,9
PNS	28	20
Pedagang/Wiraswasta	55	39,3
Pensiunan PNS/TNI/Polri	9	6,4
Lainnya	16	11,4
Jumlah	140	100

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2012

4.3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Somba Opu

Tugas pokok dan fungsi camat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana camat mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2008, yaitu:

- d. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- f. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Dari ketiga tugas pokok dan fungsi camat ini, kemudian ditetapkan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan camat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, antara lain: tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri musrenbang, tingkat keberhasilan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta bentuk evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan.

Untuk melihat secara jelas dan komprehensif mengenai penelitian ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.9.

Tabel 4.9. Gambaran Umum Variabel Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Somba Opu

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mendorong Partisipasi	140	2	4	2.58	.374
Pembinaan dan Pengawasan	140	2	4	2.58	.366
Melakukan Evaluasi	140	2	4	2.54	.376
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Hasil olah data 2012

Secara detail gambaran umum variabel-variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat

Musrenbang kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke musrenbang daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Forum musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Gowa Dapil Somba Opu, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Secara umum gambaran subyek masyarakat (responden) kecamatan Somba Opu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini mendorong partisipasi berada pada level sedang dengan angka rata-rata 2,58. Peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh camat Somba Opu, Andi Kumala Idjo, SH yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti

musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung.” Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2012.

Untuk angka rata-rata dari item mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti forum musrenbang yang tergolong sedang dengan nilai rata-rata (mean) 2,58 dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif dari hasil pengolahan data dibawah ini:

Tabel 4.10. Skor Rata-rata Partisipasi

N	Valid	140
	Missing	0
Mean		2.58
Std. Deviation		.374
Minimum		2
Maximum		4

Sumber: Hasil olah data 2012

2. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan.

Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

a. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang camat dalam kapasitasnya selaku coordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

b. Pembinaan

Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya. Secara umum gambaran subyek masyarakat (responden) kecamatan Somba Opu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan berada pada level yang sedang dengan nilai rata-rata (mean) 2,58. Angka rata-rata hasil analisis untuk variabel pembinaan dan pengawasan dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11. Skor Rata-rata Pembinaan dan Pengawasan

N	Valid	140
	Missing	0
Mean		2.58
Std. Deviation		.366
Minimum		2
Maximum		4

Sumber: Hasil olah data 2012

Pengawasan dan pembinaan camat yang tergolong sedang ini senada dengan yang disampaikan oleh senior fasilitator tim PNPM-MP kecamatan Somba Opu Asnimihram, ST yang mengatakan:

“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke kecamatan, tidak berarti camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang kecamatan, tetapi berkanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan”
Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2012.

3. Melakukan Evaluasi

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada masa yang akan datang.

Secara umum gambaran subyek masyarakat (responden) kecamatan Somba Opu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini melakukan evaluasi berada pada level yang sedang. Berarti secara umum, evaluasi yang dilakukan

camat cukup berpengaruh. Angka rata-rata analisis dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif di bawah ini:

Tabel 4.12. Skor rata-rata evaluasi

N	Valid	140
	Missing	0
Mean		2.54
Std. Deviation		.376
Minimum		2
Maximum		4

Sumber: Hasil olah data 2012

Setelah menganalisis satu persatu item variabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka diperoleh rata-rata dari setiap item yang tergolong sedang yaitu 2,58. Untuk melihat nilai rata-rata dari variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13. Total Variabel 1

N	Valid	140
	Missing	0
Mean		2.58
Std. Deviation		.361
Minimum		2
Maximum		4

Sumber: Hasil olah data 2012

4.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penelitian ini ada 3 hal yang dianggap mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah kepemimpinan camat, dukungan sarana dan prasarana, serta

dukungan anggaran. Dari data primer yang kemudian diolah melalui SPSS 16,0 secara umum gambaran variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dapat kita lihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.14. Gambaran umum variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FAKTOR PEMIMPIN	140	2	4	2.61	.363
SARANA	140	2	3	2.60	.339
ANGGARAN	140	2	4	2.65	.368
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Hasil olah data 2012

1. Kepemimpinan camat

Pada tingkatan kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah kegiatan. Jika dikontekskan dengan penelitian ini adalah sejauh mana sarana dan prasarana yang memadai dan tersedia mampu menunjang keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Faktor anggaran

Yang dimaksud dukungan anggaran dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi dan peran anggaran atau pendanaan yang diperuntukkan bagi kegiatan

pemberdayaan masyarakat dapat menunjang keberhasilan kegiatan tersebut. Karena bagaimanapun juga anggaran merupakan salah satu hal terpenting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kegiatan.

4.3.1. Analisis regresi sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat

Untuk menguji tingkat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi serta melihat apakah faktor-faktor yang ditemukan mempunyai pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 16,0.

1. Faktor kepemimpinan camat

Berikut adalah tabel korelasi, model summary dan annova dari data primer yang telah diolah dengan analisis regresi sederhana untuk menemukan hubungan antara faktor kepemimpinan camat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam koordinasi pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.15. Hubungan antara faktor kepemimpinan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat

Correlations		total_indikator	faktor_pemimpin
Pearson Correlation	total_indikator	1.000	.817
	faktor_pemimpin	.817	1.000
Sig. (1-tailed)	total_indikator	.	.000
	faktor_pemimpin	.000	.
N	total_indikator	140	140
	faktor_pemimpin	140	140

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.665	.209

a. Predictors: (Constant), faktor_pemimpin

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.086	1	12.086	277.054	.000 ^a
	Residual	6.020	138	.044		
	Total	18.106	139			

a. Predictors: (Constant), faktor_pemimpin

b. Dependent Variable: total_indikator

Sumber : Hasil olah data tahun 2012

Untuk melihat tingkat pengaruh kepemimpinan camat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dilakukan pengujian dengan cara korelasi sederhana antara variabel. Dari hasil analisa hubungan seperti yang tampak pada hasil olah data diatas dapat diketahui hubungan antara variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat (x) memiliki hubungan yang signifikan pada taraf signifikan 0,05 dengan faktor kepemimpinan camat. Artinya, kepemimpinan camat memiliki pengaruh yang searah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, dengan kata lain jika kepemimpinan camat tinggi maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga akan tinggi, begitupula sebaliknya. Hal ini diperoleh dengan menggunakan angka signifikansi atau sig dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika angka signifikansi penelitian $< 0,05$; H0 ditolak dan H1 diterima

Jika angka signifikansi penelitian $> 0,05$; H1 ditolak dan H0 diterima

Dari perhitungan tersebut diperoleh angka signifikansi sebesar 0,00. Angka 0,00 < 0,05. Oleh karena itu H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya ada hubungan linear antara variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dengan faktor kepemimpinan camat tersebut. Karena terdapat hubungan yang linear, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kepemimpinan camat memang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.

Untuk menghitung besarnya pengaruh frekuensi faktor kepemimpinan camat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi camat, dapat dilihat pada angka R square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R square disebut juga koefisien determinasi. Besarnya angka koefisien determinasi pada perhitungan diatas adalah 0,668 atau sama dengan 66,8%. Angka ini menjelaskan bahwa sebesar 66,8% variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dapat dijelaskan melalui faktor kepemimpinan camat. Dengan kata lain, besarnya pengaruh kepemimpinan camat terhadap tugas pokok dan fungsi camat adalah sebesar 66,8%.

2. Faktor sarana dan prasarana

Tabel 4.16. Hubungan antara faktor sarana dan prasarana dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat

Correlations		total_indikator	sarana
Pearson Correlation	total_indikator	1.000	.691
	sarana	.691	1.000
Sig. (1-tailed)	total_indikator	.	.000
	sarana	.000	.
N	total_indikator	140	140
	sarana	140	140

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.477	.473	.262

a. Predictors: (Constant), sarana

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.635	1	8.635	125.814	.000 ^a
	Residual	9.471	138	.069		
	Total	18.106	139			

a. Predictors: (Constant), sarana

b. Dependent Variable: total_indikator

Untuk melihat tingkat pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dilakukan pengujian dengan cara korelasi sederhana antara variabel. Dari hasil analisa hubungan seperti yang tampak pada hasil olah data diatas dapat diketahui hubungan antara variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat (x) memiliki hubungan yang signifikan pada taraf signifikan 0,05 dengan faktor sarana dan prasarana. Artinya, faktor sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang searah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, dengan kata lain jika faktor sarana dan prasarana tinggi maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga akan tinggi, begitupula sebaliknya. Hal ini diperoleh dengan menggunakan angka signifikansi atau sig dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika angka signifikansi penelitian $< 0,05$; H0 ditolak dan H1 diterima

Jika angka signifikansi penelitian $> 0,05$; H1 ditolak dan H0 diterima

Dari perhitungan tersebut diperoleh angka signifikansi sebesar 0,00. Angka 0,00 < 0,05. Oleh karena itu H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya ada hubungan linear antara variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dengan faktor sarana dan prasarana tersebut. Karena terdapat hubungan yang linear, maka dapat disimpulkan bahwa faktor sarana dan prasarana memang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.

Untuk menghitung besarnya pengaruh frekuensi faktor sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi camat, dapat dilihat pada angka R square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R square disebut juga koefisien determinasi. Besarnya angka koefisien determinasi pada perhitungan diatas adalah 0,477 atau sama dengan 47,7%. Angka ini menjelaskan bahwa sebesar 47,7% variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dapat dijelaskan melalui faktor kepemimpinan camat. Dengan kata lain, besarnya pengaruh kepemimpinan camat terhadap tugas pokok dan fungsi camat adalah sebesar 47,7%.

3. Faktor anggaran

Tabel 4.17. Hubungan antara faktor anggaran dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat

Correlations		total_indikator	anggaran
Pearson Correlation	total_indikator	1.000	.742
	anggaran	.742	1.000
Sig. (1-tailed)	total_indikator	.	.000
	anggaran	.000	.
N	total_indikator	140	140
	anggaran	140	140

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.551	.548	.243

a. Predictors: (Constant), anggaran

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.980	1	9.980	169.476	.000 ^a
	Residual	8.126	138	.059		
	Total	18.106	139			

a. Predictors: (Constant), anggaran

b. Dependent Variable: total_indikator

Sumber: Hasil olah data Tahun 2012

Untuk melihat tingkat pengaruh faktor anggaran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dilakukan pengujian dengan cara korelasi sederhana antara variabel. Dari hasil analisa hubungan seperti yang tampak pada hasil olah data diatas dapat diketahui hubungan antara variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat (x) memiliki hubungan yang signifikan pada taraf signifikan 0,05 dengan faktor anggaran. Artinya, faktor anggaran memiliki pengaruh yang searah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, dengan kata lain jika faktor anggaran tinggi maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga akan tinggi, begitupula sebaliknya. Hal ini diperoleh dengan menggunakan angka signifikansi atau sig dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika angka signifikansi penelitian < 0,05; H0 ditolak dan H1 diterima

Jika angka signifikansi penelitian $> 0,05$; H_1 ditolak dan H_0 diterima

Dari perhitungan tersebut diperoleh angka signifikansi sebesar 0,00. Angka 0,00 $< 0,05$. Oleh karena itu H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya ada hubungan linear antara variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dengan faktor anggaran tersebut. Karena terdapat hubungan yang linear, maka dapat disimpulkan bahwa faktor anggaran memang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat.

Untuk menghitung besarnya pengaruh frekuensi faktor anggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi camat, dapat dilihat pada angka R square (angka korelasi yang dikuadratkan). Angka R square disebut juga koefisien determinasi. Besarnya angka koefisien determinasi pada perhitungan diatas adalah 0,551 atau sama dengan 55,1%. Angka ini menjelaskan bahwa sebesar 55,1% variabel pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dapat dijelaskan melalui faktor kepemimpinan camat. Dengan kata lain, besarnya pengaruh kepemimpinan camat terhadap tugas pokok dan fungsi camat adalah sebesar 55,1%.

Dari hasil analisa data ketiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat di atas, maka dapat dilihat ketiga faktor ini mempunyai pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dengan intensitas yang berbeda-beda. Ketiga faktor ini juga mempunyai hubungan linear dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat. Dari ketiga faktor ini, faktor kepemimpinan camat mempunyai pengaruh paling besar disbanding faktor lainnya. Terlihat dengan tingkat angka koefisien determinasi (R square) dari faktor kemampuan memimpin camat yang paling tinggi disbanding faktor sarana dan prasarana serta faktor anggaran.

Faktor kepemimpinan camat yang tergolong tinggi ini senada dengan apa yang disampaikan oleh lurah Katangka, Al Ashar Achmad yang mengatakan:

“Berkaitan dengan kemampuan memimpin camat sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau termasuk tipikal yang aktif baik dalam kegiatan pembangunan kecamatan maupun dalam pelayanan masyarakat. Walaupun tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat saat ini masih dianggap sebagai pemimpin baik bagi kami penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat kecamatan Somba Opu pada umumnya.”

Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan pernyataan singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran dalam hal ini merupakan saran-saran dari penulis berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis.

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat terbagi atas 3 variabel yaitu: mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dikategorikan sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil olah data kuesioner dengan responden yang terlibat langsung dengan unit kegiatan masyarakat dengan angka rata-rata 2,58. Berarti secara umum peran camat dalam mendorong partisipasi cukup baik.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dibagi menjadi 3 indikator yaitu: pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini kemudian dikategorikan sedang dengan melihat hasil olah data kuesioner yang mempunyai rata-rata 2,58. Secara umum penilaian ini menggambarkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat juga cukup baik.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam hal ini melakukan evaluasi berada pada level sedang dengan nilai rata-rata 2,54. Berarti secara umum masyarakat mengakui pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh camat juga cukup baik.

Untuk keseluruhan item variabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diperoleh rata-rata yang tergolong sedang yaitu 2,58. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum diakui cukup baik dan cukup berpengaruh.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat:

Dari ketiga faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat, yaitu faktor kepemimpinan camat, faktor sarana dan prasana, serta faktor anggaran, ketiganya memang terbukti memiliki hubungan yang linear dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil analisa regresi sederhana yang memperlihatkan signifikansi dan hubungan ketergantungan antara ketiga faktor dengan variabel tugas pokok dan fungsi camat.

Setelah data dianalisis melalui metode regresi sederhana, maka diperoleh data yang memperlihatkan bahwa faktor kepemimpinan memiliki pengaruh yang paling besar disbanding ketiga faktor lainnya. Terlihat dari hasil analisis regresi sederhana nilai R square faktor kepemimpinan camat senilai 66,8% sedangkan faktor sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing senilai 47,7% dan 55,1%.

5.2. Saran

a. Camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Mulai dari mendorong partisipasi masyarakat, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi harus lebih diperhatikan agar dapat tercapai tujuan bersama yang lebih maksimal.

b. Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kepemimpinan camat, sarana dan prasarana, serta faktor anggaran juga seharusnya lebih ditingkatkan dan diperhatikan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Billah, MM. 1996. “*Good Governance dan Kontrol Sosial*”, dalam Prisma No. 8. Jakarta: LP3ES.

Budiarjo, Miriam., 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dharmawan, Arya Hadi., 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 07, Bogor.

Handayanigrat, S., 1980, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Penerbit: CV Haji Masagung, Jakarta.

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka.

Kinseng, R.A., 2008, *Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Kecamatan*. Project Working Paper No. 03, Bogor.

Labolo, Muhadam., 2008, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kertapradja, E. Koswara, *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;

Sarwono,Jonathan,2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,Yogyakarta; Graha Ilm

Fisipol UGM. 2002. Desentralisasi dan Demokrasi: Kajian Tentang Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi, dan Intermediary.

Laporan Akhir Penelitian, Kerjasama Fisipol UGM Yogyakarta – The Ford Foundation.

Lay, Cornelis. 2002. Kecamatan Sebagai Aena Pelayanan Publik (Studi Kasus 14 Kecamatan di Indonesia). Seri Kajian Kecamatan di Indonesia. Laporan Penelitian. The Ford Foundation.

Irawan Presetya dkk (1997), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Gunung Agung.

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Setneg, Jakarta;

Syaukani, H, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PUSKAP

Yuwono, Teguh (ed.). 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Gowa Nomor 53 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Anonim, 2009, Gowa dalam Angka 2009, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Gowa.